Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Komunitas serta Revitalisasi Kelembagaan Ekonomi dan Sosial di Sulawesi Selatan

Syamsu Nujum
Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia

Abstract: Poverty alleviation strategies through community empowerment as well as economic and social institution revitalization in South Sulawesi. The purpose of this research were (1) to study the extent to which the roles of South Sulawesi government in empowering the marginal/poor community through various programs, (2) to study and explain the extent to which the benefits of poor community empowerment programs in efforts to alleviate poverty, (3) to study and explain poverty alleviation strategies which were suitable with local wisdom of local community in South Sulawesi. Approach type used in this research was qualitative with the use of primary and secondary data, but the main data were primary data which were obtained directly from research sources included individuals representing poor community, individuals representing government. Key informants were selected from this research subjects representing poor community, community figures and government. Data analysis technique used was descriptive technique by using phenomenology paradigm and Grand Theory. Research results show that strategies implemented by government did not yet touch the poor community as a whole so that strategies which were suitable with local conditions were needed through involving local institutions as program supports in order to be effective. Poor community empowerment programs consisted of P2KP, KUT, PNPM-Mandiri, Raskin, and BLT. These programs gave benefits in alleviating rural and urban poverty but they did not run maximally because they only could serve a small part of the existing poor community. This research also build a model of empowerment in alleviating poverty through empowerment of micro, small and medium scale enterprises.

Keywords: Poor Community Empowerment, Local Institutions

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, baik negara maju apalagi negara berkembang. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi issu global. Artinya kemiskinan tidak saja menjadi masalah pokok di Negara Dunia Ketiga, tetapi juga merupakan persoalan di Negara Industri Maju, hal ini setidaknya dapat dicermati pada data yang menunjukkan, bahwa di Amerika Serikat pada tahun 1980 masih terdapat 2,8 juta orang yang disubsidi, lebih dari setengah dari kelompok itu masih tergolong miskin, sebagaimana dikemukan (Sulaiman, 1996 dalam Muhtar, 2005).

Sebagaimana halnya dengan Sulawesi Selatan. Sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti; Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (PEMP), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Raskin, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ke semua program pemberdayaan masyarakat miskin seperti itu belum dapat berjalan secara efektif.

Untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif, peran kelembagaan lokal sangat strategis dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran hasil-hasil produksi masyarakat utamanya yang tinggal di pinggiran kota yang sangat jauh dari fasilitas transportasi dan lembaga keuangan, pemasaran, sehingga kehadiran kelembagaan lokal diharapkan dapat berpanggung sebagai kutub pengaman dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi masyarakat lokal. Kesulitan akses bagi masyarakat terhadap sumber-sumberdaya produktif merupakan penyebab paling utama timbulnya kemiskinan masyarakat. Untuk membuka akses bagi masyarakat kepada sumber-sumber daya produktif seperti modal, pemasaran, dan teknologi produksi, maka kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial sangat memang peran penting dalam memediasi keperluan masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan fenomena kemiskinan yang tampak di dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis pada komunitas dan kelembagaan masyarakat lokal, karena ada praduga bahwa strategi yang dijalankan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai jenis program, dipandang masih memiliki sisi kelemahan, karena program yang dilakukan pemerintah selama ini (pelita pertama hingga sekarang) masih pada tataran kebijakan yang sifatnya hanya penanganan sesaat, dan belum merupakan sebuah program yang mengakar didalam masyarakat, karena kurang melembaga.

Penelitian ini mencoba untuk membangun konsep strategi pengentasan kemiskinan melalui intervensi komunitas masyarakat miskin dan revitalisasi kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, yang diyakini dapat membantu masyarakat dalam melakukan akses terhadap kegiatan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya dapat membangkitkan munculnya modal sosial yang juga merupakan potensi yang besar yang dapat mendorong perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini diharapkan mempunyai urgensi dalam merumuskan sebuah konsep strategi dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, namun sering berganti-ganti dan selalu mencari bentuk. Hal itu disebabkan karena strategi dan kebijakan yang diambil merupakan sebuah konsep yang muncul dari atas (pemikiran kebijakan) dan bukan konsep yang lahir dari bawah sehingga hampir semua program pengentasan kemiskinan merupakan program bongkar pasang. Akibatnya program yang dibuat sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya: program raskin dan BLT yang berlaku secara umum tanpa memilah kelompok miskin mana yang merupakan sasaran, serta sistemnya yang belum memadai sehingga hasil program tersebut lambat laun menjadi tidak efektif lagi pada hal anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai program sangat memadai untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, tetapi karena sistemnya yang lemah maka hasilnya menjadi tidak jelas.

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian yang paparkan diatas, maka dikemukakan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana pemahaman pemerintah dan masyarakat, serta Tokoh masyarakat terhadap strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah?
- Bagaimana pemahaman pemerintah dan masyarakat, serta Tokoh masyarakat tentang dampak dari strategi pengentasan kemiskinan?
- Bagaimana pemahaman pemerintah, dan masyarakat, serta Tokoh masyarakat tentang pemberdayaan kelembagaan Ekonomi dan kelembagaan sosial dalam program pengentasan kemiskinan?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model strategi pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan dan kesempatan kerja) di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan sebuah konsep pengembangan strategi dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah, perencana, lingkungan perguruan tinggi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat di masa kini dan masa akan datang khususnya di Sulawesi Selatan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Strategi

Kebutuhan akan strategi dalam kegiatan pembangunan merupakan kebutuhan vital dan sifatnya...
Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Komunitas

kritis, karena itu strategi sering dipandang sebagai suatu langkah yang sangat menentukan di dalam penca-pana tujuan. Riyadi (2003) menyatakan, bahwa strategi perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam proses per-\musuan atau penyusunan rencana-rencana pembangunan di suatu wilayah/daerah tertentu, mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, sasar, sebagai bagian atau tahapan dari keseluruhan proses pembangunan yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat makro atau luas. Strategi dalam hal ini dibedakan dalam pengertian teknik yang bersifat detail.


Nurkholis (2001), bawha strategi pada hakikatnya merupakan rencana tindakan yang bersifat umum, berjangka panjang (berorientasi ke masa depan), dan cakupannya luas. Oleh karena itu, strategi biasanya dirumuskan dalam kalimat yang kandungan maknanya sangat umum dan tidak merujuk pada tindakan spesifik atau rinci. Namun demikian dalam perencanaan kebijakan tidak berarti bahwa "tindakan rinci dan spesifik" yang biasanya dirumuskan dalam suatu program kerja tidak harus disusun. Sebaliknya program-program kerja tersebut harus direncanakan pula dalam proses perencanaan strategik dan bahkan harus dapat dirumuskan atau didefinisikan ukuran kinerjanya.

Hax dan Majluf dalam Salusu (2002) menyatakan bahwa strategi:
- Ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
- Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumberdaya;
- Menyelesaikan bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
- Mencoba mendapatkan keuangan yang mampu bertahan lama memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
- Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi. Berdasarkan defenisi ini, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental sebagai tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyusun diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Atas dasar itulah maka secara ringkas strategi dapat diartikan sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Teori dan Konsep Pemberdayaan


Jack Rothman (1968) dalam Suharto (2005) mengembangkan tiga model yang berguna untuk memahami konsep tentang pengembangan masyarakat, meliputi; (1) pengembangan masyarakat lokal (local development); (2) perencanaan sosial (social planning); dan (3) aksi sosial (social action). Paradigma ini merupakan merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya ketiga model tersebut saling bersentuhan satu sama lain. Setiap komponen-nya dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, di mana sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan, menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan (kemerdekaan) atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugastugas kehidupannya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Tim Crescent (2003), bahwa keterjadian sosial dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan publik, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat, untuk melindungi kaum miskin dan lemah dari perubahan yang merugikan dalam standar hidup, sehingga mereka memiliki standar hidup yang dapat diterima (The World Bank Research Observer, 1991). Selanjutnya lingkup keterjadian sosial meliputi:

- Pemberdayaan keluarga: sistem keterjadian sosial dalam suatu wilayah masyarakat ditentukan oleh proses pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial dan kekerabatan paling kecil dalam keluarga.
- Pemberdayaan Wilayah Komunitas: keterjadian sosial melengkapi pemberdayaan wilayah dalam, arti sistem keterjadian sosial dibangun mulai dari ketahanan wilayah komunitas masyarakat terkecil yang memungkinkan dilakukannya perencanaan dengan pengambilan keputusan bagi pembangunan sistem keterjadian sosial.
- Pemberdayaan Kelembagaan Lokal: Sistem keterjadian sosial dibangun dan dilaksanakan dengan memanfaatkan kelembagaan lokal yang sudah ada. Pembentukan lembaga baru bukan merupakan prioritas pembangunan. Lembaga baru akan dibangun jika masyarakat sendiri yang membutuhkannya dan lembaga lama tidak mampu lagi menjalankan fungsinya di dalam pengembangan keterjadian sosial.


- Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politik dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Pearson, et al., 1994).

Pemberdayaan merupakan aspek yang sangat penting mendapat perhatian dalam membuat suatu kebijakan publik agar jelas arah dan sasaran yang akan dituju dan dicapai oleh suatu kebijakan publik, dan yang paling penting adalah bagaimana kebijakan tersebut mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan pendapat di atas, Senett dan Cobb (1972) dan Conway (1979) dalam Suharto (2005:61) menyatakan bahwa ketidak berdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketidakberdayaan jaminan ekonomi, kurangnya pengalaman atau akses dalam arena politik, ketaadaan akses terhadap informasi, ketaadaan dukungan finansial, ketaadaan pelatihan,

**Konsep dan Indikator Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis,
Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Komunitas

gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi di mana sesorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Secara umum konsep kemiskinan dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, namun dapat dibedakan dalam tiga bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Townsend dalam Ridwan (2008), sebagai berikut:

- Kemiskinan absolute, yakni suatu keadaan di mana tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapataannya tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum hidupnya. Oleh karena itu kemiskinan absolute sering disebut dengan kemiskinan alami.

- Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan dengan melihat berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelompok pendapatan lainnya.(didasarkan pada dimensi tempat dan waktu).

- Kemiskinan Kultural yakni bentuk kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang karena factor budaya mereka tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada upaya pihak luar untuk membantunya. Bahkan dalam teori "budaya kemiskinan" telah dinyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin itu sendiri, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya.


Lebih jauh lagi, kemiskinan dipandang tidak hanya menyangkut standar pendapatan atau konsumsi yang rendah melainkan juga rendahnya kebebasan berpolitik dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut berkaitan pula dengan keterbatasan fasilitas umum, pilihan, kesempatan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Sen, 1999; Pandji-Indra, 2001).

Konsep dan Teori Kelembagaan

Ada sebuah keyakinan bahwa kelembagaan (institutional) dapat menjadi sumber efisien dalam kemajuan ekonomi yang telah diterima oleh sebagian besar ekonom, bahkan yang paling liberal sekalipun. Hanya saja sampai saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai makna dan definisi dari kelembagaan. Sekurangnya, walaupun dalam tingkat substansial yang sama banyak ekonom mendefinisikan kelembagaan dengan perspektif yang beraneka ragam (Yustika, 2006:37).

North (1994) dalam Yustika (2006:41) memakai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia (human devised) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni aturan formal (formal institu-
tion), aturan informal (informal institution), dan mekanisme penekan (enforcement mechanism).

Penelitian Yang Telah Dilakukan dan Hasil Yang Dicapai

Nujum (2001) melakukan penelitian tentang "Upaya penanggulangan kemiskinan pada Desa Tertinggal melalui impres desa tertinggal di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keadaan pemukiman masyarakat miskin pada umumnya tergolong pemukiman darurat, (2) bantuan dana IDT sangat bermanfaat untuk membantu kelompok miski, (3) dampak bantuan IDT terhadap peningkatan pendapatan signifikan pengaruhnya, (4) pengukuran kemiskinan dengan menggunakan indicator peneguhan perkapita pertuban ditemukan bahwa pada umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan.


METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan prospektif fenomenologi, dimaksudkan untuk dapat melakukan pengungkapan dan penjelasan fenomena yang terjadi pada komunitas Masyarakat miskin yang terdiri dari (1) Individu yang mewakili masyarakat miskin pada setiap situs (2) individu pejabat pemerintah, (3) Individu Tokoh Masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan pada empat Kabupaten/Kota yakni: Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Maros dan Barru.

ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagaimana Gambar 1.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan wawancara terbuka, pendekatan kualitatif yang menekankan pada paradigma interpretatif, agar dapat memahami makna yang ada dibalik kesadaran individu subjek penelitian. Dalam proses analisis data dibagi menjadi:

(1) bagian deskriptif yang berisikan gambaran tentang latar belakang pengamatan, tindakan dan wawancara, dan

(2) bagian reflektif yang berisikan pendapat, gagas,an, komentar, tafsiran, analisis, dan label yang diberikan oleh peneliti.

Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data
(Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Muchsin, 2006, Bungin,2003)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Akses Masyarakat terhadap Kelembagaan yang Ada

Kemiskinan masyarakat at dapat dipicu oleh kurangnya akses mereka pada lembaga-lembaga produktif seperti lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran, serta akses laimnya yang dapat mendorong mereka menjadi produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa kelembagaan lokal yang ada pada daerah penelitian masih terbatas dalam memberi akses kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan misalnya permodalan, masyarakat kesulitan mengkondisikan ke Bank karena butuhkan penjaminan sementara masyarakat miskin pada umumnya tidak memiliki jaminan. Lalu mereka mencari solusi yang lain ke lembaga pembiayaan alternatif yakni KUD/Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro namun mereka menghadapi hambatan pada terbatasnya dana pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kaitannya dengan kebutuhan akses kepada kelembagaan produktif, maka dapat dipahami bahwa masyarakat pada umumnya terkendala pada akses produktif berupa akses permodalan, akses pemasaran, maupun kurang berfungsiya kelompok kerja yang ada di dalam masyarakat sehingga membuat masyarakat terbatas dalam melakukan kegiatannya secara rutin. Pada umumnya masyarakat miskin mengandalkan usahanya pada usaha rumah tangga (Usaha Mikro), sehingga patut jika Startegi pengentasan Kmisekinan diarahkan pada pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan pemahaman informan maka, dapat dirumuskan bahwa: "Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberi akses kepada UMKM terutama pada akses modal dan akses pasar melalui

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis Kelembagaan</th>
<th>Kota Makassar</th>
<th>Kabupaten Maros</th>
<th>Kabupaten Barru</th>
<th>Kota Parepare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bank</td>
<td>Akses masyarakat</td>
<td>Akses</td>
<td>Akses</td>
<td>Akses</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>masih terbatas</td>
<td>Masyarakat masih terbatas</td>
<td>Masyarakat masih terbatas</td>
<td>Masyarakat masih terbatas</td>
</tr>
<tr>
<td>KUD</td>
<td>Akses masyarakat</td>
<td>Ada KUD tetapi kurang berfungsi</td>
<td>Ada KUD tetapi belum berfungsi secara baik</td>
<td>Akses masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>masih terbatas</td>
<td></td>
<td></td>
<td>masih terbatas</td>
</tr>
<tr>
<td>Koperasi</td>
<td>Sudah dapat di akses tapi masih terbatas</td>
<td>Sudah ada akses tapi masih terbatas jumlah masyarakat yang dapat dilayani</td>
<td>Sudah ada akses Cuma masih terbatas yang dapat dilayani</td>
<td>Masyarakat sudah dapat mengakses tapi masih terbatas</td>
</tr>
<tr>
<td>Lemb. Keu. Mikro</td>
<td>Ada tapi terbatas kemampuannya</td>
<td>Masih kurang jumlahnya dan masih terbatas pelayanannya</td>
<td>Masih terbatas jumlah dan pelayanannya</td>
<td>Sudah ada tapi belum dapat melayani secara luas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Belum ada</td>
</tr>
<tr>
<td>Lembaga Pemasarn</td>
<td>Belum ada tersedia secara khusus bagi Usaha Mikro</td>
<td>Belum ada</td>
<td>Belum ada</td>
<td>Belum ada tersedia secara khusus bagi usaha mikro</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelompok Kerja</td>
<td>Sudah cukup banyak cuma belum terbina secara baik</td>
<td>Sudah ada tapi masih sedikit jumlahnya dan belum efektif</td>
<td>Sudah ada tapi belum banyak dan belum berjalan secara efektif</td>
<td>Sudah ada namun belum mendapat pembinaan yang baik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Sumber: Hasil wawancara)
keberpihakan pemerintah, karena pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dalam pembangunan demi mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat miskin melalui UMKM".

Memahami pemahaman informan dari seluruh kalangan dalam kaitannya dengan pemihakan pemerintah dalam memberi akses modal dan pasar, dapat dipahami bahwa pada umumnya informan merasakan sebuah realitas bahwa selama ini UMKM, belum mampu berdaya dengan cara pemberdayaan yang dilakukan pemerintah memberi akses ke permodalan dan akses pasar, karena lembaga (bank) yang
tabel 2. Masalah yang dihadapi Masyarakat Miskin Dalam Usaha (Usaha Mikro) Berdasarkan Pemahaman Kalangan Informan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Masalah yang dihadapi</th>
<th>Akses Modal</th>
<th>Akses Pasar</th>
<th>Pemahaman Terhadap Pemberdayaan Melalu akses Modal dan Pasar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. UM umumnya sulit akses modal pada lembaga keuangan formal karena tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank.</td>
<td>a. Akses pasar bagi UM masih dirasakan terbatas.</td>
<td>a. Usaha pemerintah untuk menyediakan akses modal dan akses pasar secara konkrit bagi UMKM.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>e. Modal bersumber dari modal sendiri dari tabungan dan pinjaman dari kolega maupun rentenir.</td>
<td>e. Kesulitan mengakses pasar karena menghadapi saingan yang ketat dengan usaha besar, karena pada umumnya produk yang dihasilkan oleh UM juga dihasilkan oleh perusahaan besar.</td>
<td>e. Menyediakan kelembagaan yang dapat mendukung keberhasilan UMKM seperti: lembaga pembiayaan khusus bagi UM lembaga merek/label, lembaga promosi, lembaga pemasaran produk bagi UM, agar UM dapat berhasil di dalam perekonomian.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>f. Modal sudah dapat diartikan berkat bantuan Mitra usaha.</td>
<td>f. Akses pasar belum memadai karena belum memiliki jaringan dan mitra dalam pemasaran.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>g. Modal sangat terbatas, sulit untuk akses ke Bank.</td>
<td>g. UMKM menghadapi informasi pasar yang terbatas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>h. UM masih kesulitan mengakses kredit ke Bank karena persyaratan yang masih ketat diterapkan oleh Bank.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Sumber: Hasil wawancara diolah)
bersentuhan dengan UMKM dalam penyaluran kredit tidak pas antara kondisi perbankan dengan kondisi UMKM, apalagi para pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang sangat rendah, dan mereka tidak paham dengan aturan bank (tidak Banking Habit). Oleh karena itu, strategi pemberdayaan untuk membuat para pelaku UMKM akses ke lembaga pembiayaan, dibutuhkan sebuah regulasi kelembagaan pembiayaan UMKM yang sesuai dengan UMKM khususnya bagi usaha Mikro dan Usaha Kecil. Untuk tidak membungkung kelembagaan yang baru maka "Koperasi adalah sebuah lembaga pembiayaan dan sekaligus lembaga pemasaran bagi UMKM yang ideal, mengingat misi Koperasi Indonesia adalah azas kekeluargaan", Revolusi dan revitalisasi Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat sangat diperlukan untuk mengembalikan pada posisi dan proporsi Koperasi yang sebenar-benarnya sehingga usaha pemberdayaan ekonomi rakyat (UMKM) dapat terwujudkan.

Seperti halnya dengan Blakely (1989) menjelaskan bahwa untuk membangun ekonomi lokal, UMKM merupakan aspek yang penting. Untuk mengembangkan UMKM, maka ada beberapa hal yang harus tersedia untuk mendukung keberhasilannya, di antaranya adalah menyediakan lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman untuk mendorong tumbuhnya bisnis UMKM, membangun pusat-pusat pelayanan bisnis kecil, membangun pusat jaringan pemasaran untuk bisnis kecil (UMKM), dan menyediakan program-program pengembangan dan promosi. Pentingnya lembaga permodalan dan lembaga pemasaran bagi UMKM, sudah merupakan kebutuhan vital untuk menunjang keberhasilan mereka, karena pada umumnya UMKM baik di Indonesia maupun pada negara berkembang dan bahkan negara majupun, meskipun yang dihadapi adalah masalah permodalan dan pemasaran sehingga pemerintah sebagai regulator dan fasilitator menjalankan fungsinya memberi/menyediakan akses ke pada pembiayaan dan pemasaran.

Yunus (2007) memandang bahwa kesulitan masyarakat miskin atau masyarakat margjinal untuk memperoleh akses pinjaman kepada lembaga keuangan formal seperti Bank, sebagai akibat adanya aturan yang sangat ketat yang dianut oleh sistem perbankan kompensasi. Perbankan kompensasi menerapkan "kepalsuan Kapitalisme" yang jelas-jelas diskrimintif terhadap orang miskin seperti telah terlihat dari praktik perbankan, mulai dari bank lokal sampai pada bank internasional.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah konsep pemberdayaan UMKM melalui pendekatan akses Modal dan akses pasar sebagai berikut:

"Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Pada Akses Modal dan Pasar adalah merupakan sebuah langkah yang harus ditempuh oleh pihak pemerintah untuk mendorong agar UMKM dapat sukses dan berkembang. Berdasarkan pada realisme yang ada dan dialami oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah bahwa permodalan adalah sebuah masalah utama yang dihadapi dari dulu hingga saat ini, mereka kesulitan memperoleh modal pada lembaga pembiayaan formal seperti bank, kebanyakan di antara pelaku usaha UMKM lebih memilih meminjam modal kepada kerabat dan sanak keluarga dan jika terpaksa harus meminjam dari rentenir. Kebanyakan pelaku usaha UMKM melakukan pinjaman kepada saudara dan kerabat dan rentenir sekalipun karena merasakan adanya kemudahan jika dibandingkan kalau mereka harus ke bank.

Melalui bank mereka (UMKM) akan menghadapi sejumlah persyaratan yang sulit untuk dipenuhi mengingat pada umumnya pelaku UMKM adalah berstatus informal (usaha mikro dan usaha kecil) sehingga menghadapi kesulitan untuk mengakses modal melalui perbankan, kalau pun ada pelaku yang dapat akses ke bank itu adalah kecil-kecilan usaha menengah dan sebagian kecil usaha skala kecil. Fenomena seperti itu mengisyaratkan kepada semua pihak utamanya pihak pemerintah bahwa kebijakan kepemimpinan kepada UMKM dalam memberikan kemudahan akses pada permodalan perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi sehingga dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut.

Untuk mendorong perkembangan UMKM, dibutuhkan sebuah regulasi di bidang kelembagaan pembiayaan dan pemasaran yang sesuai dengan kondisi UMKM itu sendiri. Bentuk Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi, namun Koperasi memiliki dimensi yang lebih luas dalam pemberdayaan UMKM, jika dibandingkan
dengan LKM, alasannya karena lembaga ekonomi yang satu ini (Koperasi) memiliki prinsip yang sejalan dengan demokrasi ekonomi yang sudah dicanangkan sejak 63 tahun silam dan merupakan cita-cita dari bangsa yang harus diwujudkan dalam sebuah tatanan ekonomi rakyat. Karena Koperasi dapat bertindak sebagai lembaga pembiayaan dan lembaga pemasaran sehingga secara tidak langsung keberadaan keperasaan diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan permodalan dan pemasaran bagi UMKM, namun demikian karena jumlah UMKM sangat banyak maka kehadiran Lembaga Keuangan Mikro juga dibutuhkan dalam membantu melayani kebutuhan pembiayaan UMKM.

Kepemilikan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung kepada UMKM sangat dibutuhkan, mengingat pada umumnya pelaku UMKM pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, keterbatasan modal dan pasar, karena para pelaku memasuki pasar kebanyakan hanya didorong oleh kesulitan ekonomi, sehingga pasar dan modal bukan merupakan pertimbangan utama sehingga sering kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Rendahnya pendidikan para pelaku usaha UMKM, berdampak pada rendahnya kemampuan manajemen di bidang: keuangan, teknik produksi, dan pemasaran.

**Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Dilaksanakan**

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan sudah sangat banyak bentuknya dan melibatkan lintas instansi, namun hasilnya belum maksimal. Hal itu dapat dipahami bahwa melaksanakan program pengentasan kemiskinan tidak semudah yang dibayangkan karena prolemnya multi dimensi sehingga penanganannya memang harus mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Misalnya:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis Program</th>
<th>Kota Makassar</th>
<th>Kabupaten Maros</th>
<th>Kabupaten Barru</th>
<th>Kota Parepare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P2KP</td>
<td>Ada tapi masih terbatas jumlahnya</td>
<td>masih terbatas</td>
<td>masih terbatas</td>
<td>masih terbatas</td>
</tr>
<tr>
<td>KUT</td>
<td>Ada tetapi jumlah kurang mencukupi</td>
<td>Ada tetapi belum mencukupi secara baik</td>
<td>Masyarakat sudah dapat mengakses tapi masih terbatas</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RASKIN</td>
<td>Sudah dapat di akses tapi masih terbatas</td>
<td>Sudah ada akses tapi masih terbatas jumlah masyarakat yang dapat dilayani</td>
<td>Masyarakat</td>
<td>Masyarakat sudah dapat mengakses tapi masih terbatas</td>
</tr>
<tr>
<td>BLT</td>
<td>Ada tapi terbatas kemampuannya</td>
<td>Masih kurang jumlahnya dan masih terbatas</td>
<td>Masih terbatas jumlah dan pelayanannya</td>
<td>Sudah ada tapi belum dapat melayani secara luas</td>
</tr>
<tr>
<td>PNPM-Mandiri</td>
<td>Belum tersedia secara luas bagi Usaha Mikro</td>
<td>Ada tetapi belum memadai</td>
<td>Ada tetapi Belum memadai</td>
<td>Belum tersedia secara luas bagi usaha mikro</td>
</tr>
<tr>
<td>Kredit untuk Rakyat (KUR)</td>
<td>Sudah cukup banyak Cuma belum terbina secara baik</td>
<td>Sudah ada tapi masih sedikit jumlahnya dan belum efektif</td>
<td>Sudah ada tapi banyak dan belum berjalan secara efektif</td>
<td>Sudah ada namun belum mendapat pembinaan yang baik</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*(Sumber: Hasil Wawancara)*
Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Komunitas

program Pengentasan kemiskinan perkotaan P2KP yang merupakan program populer dalam memberdayakan masyarakat perkotaan.

Demikian juga halnya dengan program Kredit untuk rakyat (KUR), merupakan program yang gaungnya besar, namun pada level masyarakat masih merupakan sebuah program yang belum mampu diakses oleh masyarakat ekonomi lemah. Karena pada umumnya program yang dibuat tidak didukung oleh kelembagaan yang pas dalam implementasi program, sehingga timbul masalah. Dananya ada tetapi untuk mengaksesnya sulit sehingga sama saja tidak bisa bisa dimanfaatkan oleh rakyat karena prosedurnya yang tidak dapat dipenuhi oleh rakyat. Karena itu dibutuhkan sebuah kelembagaan lokal yang dapat memfasilitasi program pemberdayaan yang dilakukan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Ditengah masyarakat dihadirkan program P2KP, PNPM-Mandiri, BLT, KUT, namun belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak pada hal jika kepentingan Pengusaha besar selalu tersedia dana talangan, tapi mengapa kebutuhan rakyat kecil tidak disiapkan dana talangan dalam mengantisipasi kemiskinan yang menimpa mereka. Untuk mensikapi

Tabel 4. Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pengembangan UMKM

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stakeholders/Lembaga</th>
<th>Peran masing-masing Stakeholders dalam pemberdayaan Usaha Mikro (UM)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</td>
<td>Koperasi sebagai sebuah Lembaga Ekonomi Rakyat, diberi peran khusus sebagai lembaga yang dipilih Pemerintah dalam memediasi dalam menyusun Kredit pembiayaan dan mediasi pemasaran hasil produksi bagi Usaha Mikro dan Kecil, mengingat peran Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang dipandang paling sesuai dengan sesuai dengan kondisi usaha Mikro Kecil dan ideologi bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan masyarakat banyak berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan. Lembaga keuangan Mikro merupakan lembaga ekonomi yang bercirikan ekonomi kerakyatan dan diperuntukkan untuk memberikan pelayanan pembiayaan kepada UMKM.</td>
</tr>
<tr>
<td>Perguruan Tinggi, Kadin, LSM</td>
<td>Kelompok stakeholder Perguruan Tinggi, Kadin dan organisasi bisnis daerah, dan LSM, mengambil peran dalam menyediakan pusat pelatihan dalam melayani kebutuhan pelatihan dan konsultasi bisnis dari para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, melalui mediasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat agar mensebar ke stakeholder kekataan usaha Mikro Kecil dan LSM berdasarkan kompetensi masing-masing dalam menyediakan jasa pelatihan dan konsultasi bisnis bagi usaha mikro dan kecil.</td>
</tr>
<tr>
<td>Perusahaan Swasta besar, BUMN, dan BUMD</td>
<td>Kelompok stakeholder dapat berperan sebagai mitra (Bapak angkat) bagi usaha mikro dan usaha kecil, menjalin mitra dalam penyediaan bahan baku, pemasaran, dan pembiayaan usaha, melakukan sub-kontrak sehingga usaha mikro kecil bahkan usaha menengah dapat bertolong dengan sistem kemitraan tersebut, karena dengan cara bermitra dapat menghindari munculnya praktik monopoli usaha dan persaingan antara UMKM dengan usaha besar. Untuk mewujudkan pola kemitraan yang kondusif, diperlukan aturan yang jelas dalam bentuk kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah [Perda]. Sekaligus pemerintah memainkan perannya sebagai inisiatif, fasilitator, mediator, dan regulator sehingga model kemitraan dapat berjalan dengan baik, didukung oleh aturan formal baik secara Nasional, maupun regional dan Lokal. Sehingga dapat berdaya guna.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Sumber: Inspirasi dari hasil Pengangkapan Informan dengan Intuisi peneliti (Emik dan Etik))
fenomena yang terjadi dikalangan rakyat kecil, maka tidak ada pilihan kecuali mengubah mainset, dan paradigma pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara menciptakan program pemberdayaan UMKM yang didukung oleh pemerintah secara konsisten, dengan pemberdayaan UMKM dapat mendatangkan manfaat ganda yakni masyarakat sudah dibantu memperbaiki ekonomi, lapangan kerja tersedia secara luas sehingga menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Model Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan dalam Pemberdayakan Masyarakat

Berdasarkan pemakaan dan penafsiran yang dilakukan berdasarkan hasil penuturan informan
Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Komunitas
dalam penelitian ini, sehingga dapat disusun sebuah model pemberdayaan dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Berdasarkan pemakaian penuturan informan penelitian ini, ada sebuah inspirasi yang dapat ditangkap "bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat diakibatkan oleh keterbatasan mereka pada akses produktif, seperti permodalan dan pemasaran sehingga mereka tidak dapat bekerja secara produktif" karena tidak produktif maka mereka menerima pendapatan yang rendah dan berakibat pada kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian mengajukan model pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan sejumlah stakeholder dalam model sebagai fasilitator, mediator, mediasi, maupun stabilisator dalam menjemput terlaksananya program pemberdayaan masyarakat miskin sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 4.

Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bagian terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pemahaman kalangan informan individu yang mewakili pihak pemerintah, individu masyarakat, individu Tokoh masyarakat terhadap strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan belum dapat menyentuh masyarakat miskin secara luas, walaupun tidak dipungkiri bahwa program yang dilakukan memiliki manfaat tetapi manfaatnya belum menyeluruh kepada masyarakat lapisan bawah (miskin) sehingga terkesan bahwa program pengentasan yang dilakukan belum membuahkan hasil.

Dampak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat secara luas. Hal itu terungkap dari penuturan kalangan informan bahwa program pengentasan kemiskinan berupa P2KP, KUT, PNPM-Mandiri, Raskin, dan BLT belum mampu memberikan manfaat terhadap pengentasan kemiskinan perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kalangan informan dapat dimaknai bahwa peranan kelambagaan lokal belum mampu memberdayakan masyarakat local terutama lembaga keuangan dan pemasaran belum mampu mendukung program pemberdayaan masyarakat miskin sehingga pemberdayaan masyarakat belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal itu teindikasi dengan masih banyaknya masyarakat yang belum berdaya dalam kebidupannya sebagaimana data yang diperoleh bahwa terdapat 7%–20% masyarakat miskin pada daerah penelitian, dan yang tertinggi persentasenyanya adalah Kabupaten Maros dan Kabupaten Barru. Artinya bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan belum mampu mengentaskan kemiskinan di desa.

Saran
Untuk mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat miskin maka program sebaiknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal serta menempatkan kearifan lokalnya sehingga serasi dengan masalah yang dihadapi dengan program yang disediakan agar pencapaian hasil program dapat maksimum.

Untuk mengefektifkan hasil program pemberdayaan masyarakat miskin, maka sebaiknya program yang dibuat terkait dengan upaya peningkatan masyarakat perkotaan maupun pedesaan, program penempatan kebutuhan dasar masyarakat agar mereka betul-betul tersentuh dengan program pemberdayaan yang dilakukan.

Untuk mengefektifikar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, maka sudah saatnya melakukan revitalisasi kelembagaan ekonomi dan sosial berbasis lokal, sehingga dapat menunjang suksesnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di pedesaan dan perkotaan.

DAFTAR RUJUKAN


